

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan pembaharuan Islam atau modernisme dalam Islam yang dilakukan oleh kelompok “muslim modernis” di Indonesia pada awalnya timbul akibat pengaruh gerakan kebangkitan Islam Ibnu Taimiyyah (1263-1328 H) dan Ibnu Qayyim (1292-1356 H) yang menyebut gerakannya dengan nama “*Muhyi at-Tsarif Salaf*”, gerakan itu berusaha membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama yaitu ajaran para sahabat dan *tabi'in* serta ajaran Ahmad Ibnu Hanbal yang senantiasa mempraktikkan “ijtihad” dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah (Stoddart 1966:297). Gerakan pembaharuan ini muncul akibat dari penyimpangan umat Islam, yaitu agama Islam sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Menurut Muhammad Abduh penyebab kemunduran ini adalah karena sifat *Jumud* (keadaan membeku/statis/tak ada perubahan) dari kalangan umat Islam sendiri, yaitu umat Islam yang telah berpegang teguh kepada tradisi sehingga Islam sebagai agama menjadi sangat jauh dari yang sebenarnya (Nasution 1991:62).

Gerakan pembaharuan Islam itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1802 bersamaan dengan pulanginya Haji Miskin dan kawan-kawan dari Mekah. Mereka melihat secara langsung gerakan pemurnian Islam di Jazirah Arab (Wildan 1997:6-7). Secara umum, kelahiran dan perkembangan pembaharuan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap hal-hal berikut ini: (1) Kemunduran

Islam sebagai agama karena praktek-praktek penyimpangan, (2) Keterbelakangan para pemeluknya dan (3) Adanya invansi politik, kultural dan intelektual dari dunia Barat.

Tradisi (pemuka) umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu untuk menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Gerakan pembaharuan ini akhirnya berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi kelompok Islam, diantaranya yaitu Al-Jam'iyah Al-Khoiriyyah (Jamiat Khoer) di Jakarta yang berdiri pada tanggal 17 Juli 1905, Jam'iyatul Ishlah wal Irsyadil Arabi (Al-Irsyad) yang berdiri di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1915, Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 12 Nopember 1912, dan Persatuan Islam (Persis) yang baru berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung (Wildan 1995:19-21).

Persatuan Islam merupakan Organisasi sosial keagamaan yang proses berdirinya diawali dengan terbentuknya suatu kelompok tadarusan di Kota Bandung yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Keduanya merupakan keturunan dari tiga keluarga yang pindah dari Palembang pada abad 18 (Federspiel 1996:15). Bersama jama'ahnya mereka mengkaji, menguji ajaran-ajaran Islam yang kemudian menimbulkan kesadaran akan keterbelakangan, *kejumudan*, penutupan pintu *ijtihad*, *taklid* buta dan *bid'ah*.

Mereka kemudian mencoba melakukan gerakan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam dari paham-paham yang menyesatkan. Pada tanggal 12 september 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1342 H, secara resmi didirikanlah organisasi “Persatuan Islam” yang kemudian disebut Persis. Pembentukan organisasi Persatuan Islam ini berkaitan dengan kondisi umat Islam yang sangat jauh dari Islam sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Persatuan Islam yang selanjutnya disingkat Persis pada awalnya hanya berkembang di perkotaan. Hal itu karena sifat orang-orang yang hidup di perkotaan lebih terbuka terhadap perubahan. Masyarakat kota lebih mudah menerima pemikiran baru, sebaliknya masyarakat desa lebih kuat mempertahankan ajaran-ajaran kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan sejak lama sehingga sangat sulit untuk menerima ajaran baru apalagi yang ”menentang” ajaran yang sudah lama mereka biasa lakukan. Mereka yang berinteraksi dengan orang kota yang sebelumnya telah menerima dan memahami paham Persis tersebut yang pada akhirnya membawa paham baru, yaitu paham kembali kepada Al-Qur’an dan As-sunnah. Perlahan-lahan paham Persis berkembang tidak lagi terbatas di perkotaan tetapi sampai ke pinggiran kota, diantaranya ke wilayah Kabupaten Bandung.

Menurut Didi Kuswandi (wawancara tanggal 01 Agustus 2010) Persis sudah diterima oleh penduduk Kabupaten Bandung jauh sebelum didirikannya Pimpinan Daerah Persis Priangan Selatan tahun 1983, bahkan masuknya paham Persis ke Kabupaten Bandung tidak bisa dilepaskan dari awal didirikannya Persis itu sendiri tahun 1923. Pada bulan September 1929 sudah ada 5 orang warga

Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang menjadi anggota Persis, bahkan Pesantren Persis Pameungpeuk Kabupaten Bandung merupakan Pesantren Persis nomor tiga. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung termasuk daerah perkembangan awal Persis, dan sejak waktu itu paham Persis mulai berkembang di wilayah Kabupaten Bandung. Hal itu tidak terlepas dari usaha para aktivis awal Persis yang terus berusaha menyebarkan paham kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah, diantaranya yaitu dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, *tabligh*, khutbah, kelompok studi, tadarus, mendirikan sekolah-sekolah (pesantren), menerbitkan majalah-majalah dan kitab-kitab, serta berbagai aktifitas keagamaan lainnya.

Persis berperan penting dalam peningkatan sosial pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang disalurkan melalui lembaga pesantren maupun pendidikan formal lainnya. Kedua lembaga pendidikan tersebut keberadaannya tidak dapat dipungkiri telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan Persis di Kabupaten Bandung.

Sifat da'wah Persis yang mempunyai ciri khas mendahulukan penyebaran paham keagamaan dan ideologi Islam dari pada pembentukan organisasi, membuat Persis tidak membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota, oleh karena itu pengaruh organisasi Persis lebih besar dibandingkan dengan jumlah cabang ataupun anggotanya (Noer 1985:87). Walaupun demikian secara perlahan anggota Persis terus bertambah, yang selanjutnya atas inisiatif anggota-anggota tersebut didirikanlah pimpinan jama'ah dan pimpinan cabang.

Latar belakang pembentukan pimpinan daerah Persis pada tahun 1983 yaitu setelah kondisi pusat pimpinan merasa perlu mendirikan pimpinan daerah. Latar belakang lainnya yaitu kondisi Persis memungkinkan untuk melaksanakan hal tersebut, khususnya kondisi ekstern, yaitu kondisi negara yang mulai stabil pasca runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Hal itu juga tidak terlepas dari kebijakan Ketua Umum Persis pada waktu itu KH. A. Latief Mukhtar (1983-1997) yang menekankan periode kepengurusannya kepada pengembangan organisasi. Berbeda dengan masa kepemimpinan sebelum-sebelumnya yang karena kondisi sosial, politik dan kemasyarakatannya, belum memungkinkan untuk mengembangkan organisasi.

Misalnya KH. E. Abdurrahman (1962-1983), Persis dihadapkan kepada berbagai permasalahan diantaranya: ancaman akan dibubarkan oleh Pemerintah Soekarno karena menolak asas Nasakom, lepasnya Persis dari anggota istimewa Masyumi, meletusnya gerakan G.30S/PKI serta lahirnya aliran-aliran yang menyesatkan umat Islam. KH. E. Abdurrahman sebagai Ketua Umum Persis pada waktu itu mengambil kebijakan untuk “Isolasi strategis kembali ke *khittah*”, yaitu lebih memprioritaskan untuk mengisolasi diri untuk lebih mengutamakan kualitas bukan kuantitas anggota, sehingga berdampak kepada merosotnya jumlah anggota Persis (wildan 2000:145).

Pembentukan pimpinan daerah Persis bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kemajuan organisasi di setiap daerah, hal tersebut sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan organisasi Persis. Sebelum terbentuknya pimpinan daerah, setiap cabang dibina langsung oleh pusat pimpinan, tetapi

setelah terbentuknya pimpinan daerah maka pimpinan cabang dibina oleh pimpinan daerah. Pimpinan daerah Persis merupakan “tangan kanan” pimpinan pusat Persis dalam menjalankan aktivitasnya di tingkat kabupaten atau kota. Pimpinan daerah bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan pelaksanaan jihad jam’iyyah di kabupaten/kota (*Qanun Dakhili* Persis pasal 18 ayat 1).

Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung pada awal pendiriannya tahun 1983 bernama Pimpinan Daerah Persis Priangan Selatan, yaitu membawahi wilayah Kabupaten Bandung, Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (sekarang). Tetapi setelah tahun 1990 yaitu setelah muktamar ke-X berganti nama menjadi Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung yang membawahi cabang di wilayah Kabupaten Bandung saja, sedangkan untuk cabang yang berada di wilayah Cimahi pada tahun 1995 berdiri Pimpinan Daerah Kota Administratif Cimahi.

Hasil muktamar ke-X tersebut mengharuskan setiap pimpinan cabang atau pimpinan daerah menyesuaikan organisasinya dengan wilayah administratif pemerintahan, yaitu untuk satu kecamatan harus ada satu Pimpinan Cabang Persis, padahal ada beberapa cabang di Kabupaten Bandung yang berada dalam satu kecamatan. Oleh karena itu setelah adanya regulasi tersebut Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung disibukan dengan penyesuaian-penyesuaian cabang-cabang tersebut.

Organisasi Persis yang terus berkembang yaitu dengan terus bertambahnya anggota dan pimpinan cabang, menunjukkan bahwa Persis sudah menjadi salah satu organisasi yang cukup besar. Hampir di setiap kecamatan di wilayah

Kabupaten Bandung terdapat Pimpinan Cabang Persis. Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung merupakan Pimpinan Daerah Persis yang membawahi Pimpinan Cabang terbesar, yaitu lebih dari 30 Pimpinan Cabang yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung, hal ini menunjukkan bahwa Persis di Kabupaten Bandung sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai potensi massa cukup besar sehingga Persis di Kabupaten Bandung merupakan salah satu basis anggota Persis terbesar di Jawa Barat. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Latar belakang lainnya yaitu apakah setelah adanya regulasi tahun 1983 yaitu setelah berdirinya Pimpinan Daerah Persis memberikan dampak terhadap perkembangan Persis di Kabupaten Bandung?. Hal ini tampaknya perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : "Perkembangan Organisasi Persatuan Islam (Persis) Kabupaten Bandung Tahun 1980-1999".

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus kajian adalah "Bagaimana Pertumbuhan Organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Bandung tahun 1980-1999?". Permasalahan pokok yang hendak dijawab melalui penelitian ini dapat diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengapa organisasi Persis berdiri di Kabupaten Bandung?
- 2) Bagaimana dampak regulasi organisasi Persis tahun 1983 terhadap perkembangan Persis di Kabupaten Bandung?

- 3) Bagaimana visi misi Persis Kabupaten Bandung direalisasikan dalam kebijakan bidang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan?
- 4) Bagaimana peranan ulama/kyai dalam mendukung kemajuan Organisasi Persis di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk “mengetahui bagaimana perkembangan Persis di Kabupaten Bandung tahun 1980-1999”. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Mendeskripsikan latar belakang pembentukan organisasi Persis di Kabupaten Bandung yang bernama Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung tahun 1983.
2. Mengetahui dampak regulasi organisasi Persis tahun 1983 yaitu setelah berdirinya Pimpinan Daerah Persis terhadap perkembangan Persis di Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui visi misi Persis Kabupaten Bandung direalisasikan dalam kebijakan bidang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.
4. Mengetahui peranan ulama/kyai dalam mendukung kemajuan Persis di Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran secara kronologis mengenai Organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Bandung.
2. Menambah literatur penulisan sejarah lokal Organisasi Islam di Indonesia khususnya sejarah yang membahas mengenai gerakan pembaharuan Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan sejarah di masa yang akan datang.
4. Memberikan kontribusi penelitian terhadap perkembangan penulisan sejarah mengenai perkembangan Organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Bandung tahun 1980-1999.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun sumbangan pemikiran bagi pihak lain untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan Organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Bandung.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Historis dan sejarah lisan. Seperti yang dijelaskan oleh Heliuss Samsudin dalam salah satu bukunya yang berjudul “Metodologi Sejarah”, metode sejarah terbagi atas empat kegiatan, yakni:

- a. *Heuristik*, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mendatangi tokoh-tokoh Persis di

Kabupaten Bandung untuk mendapatkan data mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti dengan melakukan wawancara. Selain itu penulis juga mendatangi berbagai perpustakaan, diantaranya: Perpustakaan dan kantor arsip Persis baik di pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan Cabang serta perpustakaan pribadi para anggota dan tokoh-tokoh Persis Kabupaten Bandung. Penulis juga mencari dan mengumpulkan sumber-sumber ke Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan perpustakaan lainnya baik perpustakaan Perguruan Tinggi maupun Perpustakaan milik Pemerintah Daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu penulis pun mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, seperti membeli buku-buku di Gramedia, Palasari, Gunung Agung, toko-toko buku di Bandung, pameran buku dan mencari sumber-sumber melalui internet.

b. Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya (internal dan eksternal). Kritik internal dilakukan oleh penulis untuk melihat layak tidaknya isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan penelitian dan penulisan skripsi. Kritik eksternal dilakukan oleh penulis untuk melihat bentuk dari sumber tersebut. Dalam tahap ini, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap sumber-sumber yang diperoleh yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian ini.

- c. *Interpretasi*, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, penulis mengerahkan seluruh kemampuan intelektual dalam membuat deskripsi, analisis kritis serta seleksi dari fakta-fakta tersebut. Kegiatan penafsiran ini dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep-konsep dan teori-teori yang telah diteliti oleh penulis sebelumnya. Penulis juga melakukan pemberian makna terhadap fakta dan data yang kemudian disusun, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain. Fakta dan data kontekstual yang telah diseleksi dan ditafsirkan selanjutnya dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Misalnya, dalam kegiatan ini, penulis memberi penekanan penafsiran terhadap data dan fakta yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
- d. *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan tentang perkembangan organisasi Persis di Kabupaten Bandung yang jelas dalam bahasa yang sederhana dan menggunakan tata penulisan EYD yang baik dan benar.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini, penulis berusaha untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi, rumusan masalah yang menjadi beberapa permasalahan untuk mendapatkan data-data temuan di lapangan, pembatasan masalah guna memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan permasalahan utama, tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Kepustakaan, Bab ini akan dijabarkan mengenai daftar literatur yang dipergunakan yang dapat mendukung dalam penulisan terhadap permasalahan yang dikaji. Pada bagian bab kedua, berisi mengenai suatu pengarah dan penjelasan mengenai topik permasalahan yang penulis teliti dengan mengacu pada suatu tinjauan pustaka melalui suatu metode studi kepustakaan, sehingga penulis mengharapkan tinjauan pustaka ini bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian yang penulis lakukan serta dapat memperjelas isi pembahasan yang penulis uraikan berdasarkan data-data temuan di lapangan.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini mengkaji tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. Dalam bab ini juga, penulis

berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan penelitian, metode penelitian ini harus mampu menjelaskan langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir harus diuraikan secara rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji.

Bab IV Pembahasan, Bab ini merupakan penjabaran tentang temuan dan hasil interpretasi yang telah penulis temukan di lapangan. Hal ini juga merupakan jawaban dari rumusan masalah. Penulis berusaha mengkritisi data-data temuan di lapangan dengan membandingkannya kepada bahan atau sumber yang mendukung pada permasalahan yang penulis teliti. Selain itu juga dalam bab ini dipaparkan pula mengenai pandangan penulis terhadap permasalahan yang menjadi titik fokus dalam penelitian yang penulis lakukan.

Bab V Kesimpulan, Bab terakhir ini berisi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab empat dan hasil analisis yang penulis lakukan merupakan kesimpulan secara menyeluruh yang menggambarkan Perkembangan Organisasi Persatuan Islam di Kabupaten Bandung Tahun 1980-1999 berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini.